

## **BAB III**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **3.1 Respons Terhadap Affirmative Action**

##### **3.1.1 Respons DPP PDI Perjuangan**

Rendahya keterwakilan perempuan di legislatif baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah membuat pemerintah mengeluarkan kebijakan Afirmatif yang mana di buat pertama kali pada tahun 2003 dan terus mengalami modifikasi dan perkembangan. Kebijakan afirmasi pertama kalidiatur dalam Undang-undang Nomor 12 tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pada pasal 65 ayat 1 menyebutkan bahwa Setiap partai politik peserta pemilu dapat mengajukan calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap daerah pilihannya dengan memperhatikan sekurang-kurangnya 30% keterwakilan perempuan. Adanya peraturan tersebut diharapkan dapat meningkatkan peran perempuan di lembaga legislatif. Undang-undang berikutnya yaitu Undang-undang no 10 tahun 2008, No.8 tahun 2012, dan undang-undang no 7 tahun 2017 mengharuskan bahwa daftar bakal calon anggota legislatif yang diajukan partai politik, memuat 30% keterwakilan perempuan ditambah dengan aturan setiap tiga nama calon legislatif setidaknya terdapat satu orang calon legislatif perempuan

Menjelang pemilu 2014, KPU mengeluarkan peraturan No 7 tahun 2013, yang menegaskan kembali kewajiban bagi partai politik dalam pemenuhan keterwakilan

perempuan dalam daftar bakal calon legislatif yang diajukan parpol peserta pemilu, Peraturan KPU No. 7 tahun 2013 tentang aturan pencalonan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. aturan ini menegaskan keharusan kuota perempuan sebanyak 30% disetiap daerah pemilihan dan terdapat sanksi apabila partai politik tidak dapat memenuhi minimal kuota calon legislatif perempuan yang telah ditetapkan berupa, partai politik tersebut tidak dapat mengikuti pemilu di dapil yang bersangkutan

Peraturan terkait afirmatif action tersebut memaksa partai untuk berlomba-lomba mencari anggota perempuan termasuk yang dilakukan oleh PDI Perjuangan. PDI Perjuangan merupakan salah satu partai peserta pemilu 2019 yang bersifat berideologi nasionalis dan memiliki basis masa yang besar di beberapa wilayah di Indonesia khususnya di Jawa Tengah. PDI Perjuangan pada dasarnya mendukung adanya kebijakan tentang 30% keterwakilan perempuan di parlemen agar seluruh kepentingan dari masyarakat bisa diakomodasi, salah satunya adalah kepentingan perempuan yang akan efektif jika diakomodasi juga oleh legislator perempuan. Dalam perekrutan calon legislatif DPP PDI Perjuangan berpegang pada peraturan pelaksanaan pemilu seperti halnya pemenuhan kuota 30% Perempuan dalam pencalonan legislatif dan penggunaan system zipper system dalam daftar calonya. Seperti yang dikatakan Pak Untung

Pemenuhan kuota 30% bagi kami itu bukan suatu masalah, dilihat dari tujuannya memiliki tujuan yang baik, yaitu meningkatkan keterwakilan perempuan. Kita juga tidak bisa untuk tidak melaksanakan peraturan tersebut karna bakal kena sanksi juga dari KPU jika tidak melaksanakannya. Dalam hal rekrutmen perempuan ini partai berkomitmen penuh untuk membuka pintu selebar-

lebarnya dan memberika kesempatan selebar-lebarnya bagi perempuan untuk ikut berpartisipasi dan mengabdikan untuk partai dan juga masyarakat. PDI Perjuangan juga telah mengeluarkan cukup mengakomodir perempuan, dalam pencalonan legislatif PDI Perjuangan juga telah menggunakan zipper system yang mana tiap tiga caleg minimal ada satu caleg perempuan dan ketentuan-ketentuan lain terkait pencaleg juga sudah diatur secara jelas dan lengkap pada PP nomor 25 A tahun 2018

PDI Perjuangan dalam AD/ARTnya telah memberikan ruang yang cukup bagi perempuan dalam setiap tingkat kepengurusannya mulai dari tingkat DPP, DPD, dan DPC dimana di tiap kepengurusannya harus ada keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% perempuan dalam satu kepengurusan (AD/art Pasal 60 ayat 1 dan 2). AD/ART juga menyatakan bahwa dalam pemilihan umum legislatif haruslah memperhatikan keterwakilan perempuan minima sebanyak 30% di tiap dapilnya (AD/ART Pasal 20). AD/ART PDI Perjuangan telah mengatur komposisi keterwakilan perempuan dalam kepengurusan partai dan dalam pencalonan legislatif, tetapi jika di lihat lebih jauh AD/ART tidak mengatur hak dan kewajiban anggota perempuan secara lebih eksklusif untuk menjamin setaranya posisi antara laki-laki dan perempuan dalam PDI Perjuangan.

Komitmen partai terhadap perempuan tidak hanya pada hal kebijakan dalam pemenuhan kuota perempuan dalam pencalonan legislatif, tetapi berkomitmen untuk menghadirkan seorang kader yang memiliki kualitas yang lebih unggul dibandingkan dengan perempuan dari partai lain. PDI Perjuangan mendorong setiap perempuan harus mengikuti kaderisasi baik yang di selenggarakan oleh DPC, DPD maupun DPP agar setiap perempuan di PDI Perjuangan memiliki pemahaman yang baik terkait

kepartaian, kenegaraan dan permasalahan-permasalahan nasional serta di dorong untuk dapat memberikan solusi terkait permasalahan-permasalahan nasional, pada dasarnya kaderisasi ini bersifat umum sehingga terbuka untuk perempuan maupun laki-laki, tetapi perempuan juga dapat mengikuti program kaderisasi yang di khususkan untuk kader perempuan yang dinamakan “*Pendidikan Kader Khusus Perempuan*” yang di laksanakan oleh DPP PDI Perjuangan yang dilaksanakan tiap tahunnya hal ini dilakukan agar kader perempuan lebih mengerti politik dan siap bersaing di dunia politik seperti yang di ungkapkan ibu Diah Hari murti

“Tiap tahunnya DPP menjalankan program kaderisasi yang dinamakan *Pendidikan Kader Khusus Perempuan* dari Namanya kita bisa tau bahwa kegiatan ini di tujukan untuk setiap Kader-kader perempuan PDI Perjuangan tujuan dari kegiatan ini dilaksanakan tiap tahunnya, biasanya di laksanakan di Jakarta tapi tahun kemarin diadakan di Depok, Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk lebih menyiapkan Kader perempuan untuk terjun ke dunia politik dan membentuk juga membangun iklim politik yang beradap. Materi dari Pendidikan Kader Khusus Perempuan adalah tentang Kepemimpinan politik, Keterampilan/strategi politik, ideologi politik. Pada Pendidikan Kader Khusus Perempuan tahun 2018 kemarin diadakan di pada 9-12 Maret 2018 yang pelaksanaannya bertepatan dengan hari perempuan internasional”

Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Lely Purwandari caleg PDI Perjuangan

“ Perempuan yang bergabung ke PDI Perjuangan kan memiliki bermacam latar berbeda baik mulai dari karakternya, pendidikannya, kemampuan ekonominya hingga cara berpikrnya dan pengambilan keputusan. Akan sangat mudah bagi perempuan PDI Perjuangan yang memiliki karakter kuat serta didukung oleh latar belakang Pendidikan yang bagus untuk berperan aktif dalam masyarakat, lantas bagaimana dengan mereka kader-kader perempuan yang masih kurang dalam Pendidikan politiknya?. Suatu kewajiban bagi pengurus untuk meningkatkan kompetensi setiap kadernya baik perempuan maupun laki-laki dengan tahapan yang dinamakan kaderisasi, sangatlah penting pula bagi perempuan untuk ikut kaderisasi tersebut agar perempuan lebih bisa bersaing

dengan laki-laki baik itu di internal partai maupun hingga tahapan pencalonan legislatif, yang nantinya akan meningkatkan kebermanfaatan perempuan Kader-kader PDI Perjuangan untuj masyarakat kecil”

### **3.1.2 Respons DPC PDI Perjuangan Kota Semarang**

Dikeluarkanya peraturan terkait affirmative action sejak pemilihan umum 2004 membuat perubahan pola gerak partai dari yang sebelumnya tidak terlalu memperhatikan keterwakilan perempuan dalam partai, berubah pada pola pergerakan yang mulai memperhatikan keterwakilan perempuan. Untuk memenuhi persyaratan kuota yang di tetapkan oleh KPU maka pengurus partai baik dari tingkat DPP,DPW dan DPC lebih giat terjun ke masyarakat untuk menjaring kader-kader baru untuk memenuhi persyaratan minimal pemenuhan kuota perempuan pada pencalonan legislatif, banyaknya kader perempuan bukan hanya membawa dampak yang positif bagi partai tetapi juga memberikan dampak yang positif juga bagi perempuan karna kepentingan perempuan makin mudah di suarakan dan makin mudah di perjuangkan karna pada dasarnya yang mengerti kepentingan dan kebutuhan perempuan adalah perempuan itu sendiri dan kepentingan itu tentunya tidak bisa diwakili oleh laki-laki, Seperti yang di ungkapkan Novi Sukmawati Caleg PDI Perjuangan.

“Seorang kader partai pasti memiliki keinginan yang besar untu lebih mengabdikan pada Partai, Bangsa dan Negeranya, tak terkecuali saya, sebagai kader PDI Perjuangan sudah pasti ingin lebih membesarkan dan mewujudkan cita-cita partai di wilayah Kota Semarang, saya juga terlahir dari keluarga politisi yang mana ayah dan ibu saya lebih dulu menjadi anggota legislative, kedua orang tua saya adalah orang yang bijaksana dalam mengambil keputusan dan memperjuangkan rakyat, hal ini mendorong saya untuk melakukan apa yang

telah di lakukan oleh orangtua saya dengan mengabdikan kepada rakyat khususnya perempuan karna saat ini perempuan masih mengalami diskriminasi di berbagai sektor. Hidup di lingkungan kota memiliki berbagai permasalahan yang cukup rumit bagi perempuan baik itu di sector kesehatan (ibu hamil dan bayi), ketenagakerjaan dan kesejahteraan, masyarakat tentu butuh orang-orang untuk mewakili mereka demi teratasinya masalah-masalah tadi, hal ini yang mendorong saya untuk lebih berpartisipasi dalam politik.” (Wawancara 13 Juni 2019)

PDI Perjuangan Kota Semarang menyambut baik peraturan KPU terkait minimal keterwakilan 30% dalam pencalonan legislatif karna dapat memberikan keuntungan politis bagi partai dan makin menguatkan posisi partai dalam masyarakat karna jika dilihat perbandingan penduduk Kota Semarang antara laki-laki dan perempuan hampir sama, hal ini menunjukkan besarnya peluang partai untuk menyerap suara dan dukungan dari konstituen perempuan dengan menghadirkan calon-calon legislatif perempuan. Seperti yang dikatakan oleh Untung, Pengurus DPC PDI Perjuangan Kota Semarang

“Perbedaan pemilu jaman dulu dengan sekarang itu tidak hanya pada system pemilunya saja yang dulu menggunakan system pemilu proposional tertutup yang mana pemilih hanya dapat memilih partai dan penetapan pekursi legislatif nantinya yang menetapkan adalah partai juga, disini nomor urut calon legislatif menjadi suatu hal yang penting bagi seorang caleg, pada pemilu tahun 2004 terjadi perubahan system pemilu menjadi system pemilu proposional terbuka yang mana penentuan caleg terpilih atau tidak berdasarkan pada suara terbanyak. Pada pemilu proposional terbuka juga menggunakan system kuota yang mana harus ada keterwakilan perempuan minimal 30% dalam pencalonan legislatif kalau saja partai tidak memenuhi kuota tersebut partai tidak bisa ikut pemilu, dalam pemilu kali ini juga diterapkan system zipper yang mana dari setiap tiga calon legislatif terdapat minimal satu calon legislatif perempuan. Nah ketentuan ini yang sangatlah baik dan memberikan peluang yang besar bagi perempuan untuk lebih berpartisipasi dalam politik dan menyuarakan keluh-kesahnya. Kami dari tatanan DPP Sampai DPC sudah memiliki bidang Kaderisasi, kenanggotaan dan organisasi dan dengan adanya peraturan ini juga

makin mendorong partai untuk melaksanakan fungsi-fungsinya dan melahirkan kader-kader perempuan yang benar-benar handal” ( Wawancara 28 Desember 2018)

Walaupun PDI Perjuangan memiliki cukup banyak kader perempuan tetapi pada saat pertama penerapan peraturan ini partai cukup kesulitan untuk mencari perempuan-perempuan yang benar-benar memiliki tekad yang kuat untuk menjadi seorang calon legislatif, dan terlebih belum banyak perempuan yang benar-benar faham terkait ideologi partai dan pemahaman kenegaraan. DPC PDI Perjuangan tidak ingin main-main dan sembarangan terhadap penetapan seseorang untuk menjadi calon legislatif, karna hanya seorang kader yang benar-benar berkualitas saja yang berhak di calonkan dalam pemilihan umum. Perjuangan yang sulit bagi DPC PDI Perjuangan Kota Semarang untuk melahirkan calon legislatif perempuan yang handal dan berkualitas, untuk dapat menghasilkan calon legislatif perempuan yang handal partai memberikan banyak Pendidikan yang berkaitan tentang ideologi kepartaian, ketatanegaraan, dan tentunya kewanitaan. Seperti yang dikatakan oleh Untung, Pengurus DPC PDI Perjuangan Kota Semarang

“PDI Perjuangan Kota Semarang itu kurang lebih sama kaya PDI Perjuangan yang lainnya yang mana memiliki cukup banyak anggota dan kader karna memang partainya *wong cilik* dan konsen memperjuangkan kepentingan *wong cilik* sehingga cukup mudah untuk PDI Perjuangan dalam mencari anggota dan kader perempuan, walaupun memiliki banyak kader perempuan tetapi dalam urusan pencalonan legislatif ini kami tidak pernah main-main, kami tidak mau menurunkan seorang caleg baik itu laki-laki maupun perempuan dengan kualitas yang rendah karena nantinya bakal bekerja tidak maksimal untuk menyerap aspirasi dan mewujudkan kepentingan masyarakat. Kami memiliki cukup banyak Caleg laki-laki yang dinilai unggul dan memiliki kualitas sera

siap untuk bersaing untuk kepentingan masyarakat, tetapi jika calon perempuan agak sulit, maka dari itu untuk meningkatkan kualitas kader DPC PDI Perjuangan Kota Semarang sering memberikan materi-materi khusus bagi perempuan, tidak hanya di DPC tapi hingga DPP, kami mendidik dan mengembleng caleg perempuan semaksimal mungkin sampai nantinya calon perempuan tersebut memiliki kualitas yang baik dan siap di turunkan di masyarakat” (Wawancara 28 Desember 2018)

Dalam pelaksanaan pemenuhan kuota legislatif perempuan DPC PDI Perjuangan Kota Semarang tidak pernah mengeluarkan peraturan khusus terkait keterwakilan perempuan dalam kepengurusan partai dan dalam pencalonan legislatif karena setiap hal yang dilakukan oleh DPC PDI Perjuangan Kota Semarang harus berdasarkan pada peraturan yang di keluarkan oleh pimpinan partai dalam hal ini adalah peraturan partai nomor 25A tahun 2018 tentang pelaksanaan rekrutmen dan seleksi calo legislatif. Seperti yang dikatakan oleh Untung, Pengurus DPC PDI Perjuangan Kota Semarang

“ Kami tidak pernah mengeluarkan peraturan khusus untuk perempuan karena nanti kalau ada peraturan yang terkesan mengistimewakan perempuan malah akan jadi boomerang bagi kita sendiri karna nanti calon laki-laki pada protes. Kami juga tidak bisa mengeluarkan peraturan sendiri karna semua peraturan yang mengeluarkan adalah DPP yang artinya DPD dan DPC harus mengikuti dan melaksanakan peraturan dari pimpinan partai, DPC tidak bisa jalan sendiri karna nanti jika terdapat kesalahan DPC sendiri yang akan kena” (Wawancara 28 Desember 2019)

Partai memberikan perlakuan yang sama terhadap Anggota dan kader perempuan dan juga kader dan anggota laki-laki. Tidak ada perlakuan istimewa yang diberikan dari partai terhadap anggotanya, semua di perlakukan sama baik laki-laki



maupun perempuan Tidak ada pula peraturan yang diberikan partai yang secara khusus untuk lebih menguntungkan perempuan dan tidak ada pula peraturan partai yang secara khusus menguntungkan laki-laki. Hal ini dilakukan PDI Perjuangan agar terjaminnya kesamaan akses politik antara laki-laki maupun perempuan.

Walaupun Dewan Pimpinan Pusat memberikan hak pada tiap pengurus Dewan Pimpinan Cabang untuk dapat membuat peraturan tingkat DPC <sup>1</sup>, tetapi DPC PDI Perjuangan Kota Semarang tidak pernah membuat peraturan terkait dengan hal-hal yang memudahkan perempuan atau laki-laki untuk menjadi anggota, kader atau calon anggota legislatif karena setiap peraturan yang dilaksanakan oleh DPC PDI Perjuangan Kota Semarang berdasarkan pada peraturan yang dibuat oleh DPP PDI Perjuangan dan DPP PDI Perjuangan tidak mengatur hal tersebut

### **3.1.3 Respons Calon Legislatif Perempuan PDI Perjuangan DPC Kota Semarang**

Representasi politik yang demokratis terjadi jika mereka yang kepentingannya dipengaruhi atau tersentuh oleh sebuah keputusan mempunyai kapasitas untuk (terlibat) memengaruhi pembuatan keputusan tersebut. Kapasitas memengaruhi keputusan dimaknai sebagai hadirnya keterlibatan atau partisipasi politik dari kelompok yang tersentuh dengan keputusan yang akan dihasilkan. Artinya proses menghadirkan kepentingan adalah sesuatu yang bersifat *Countinue* artinya harus berkali-kali diupayakan hadir pada ruang politik

---

<sup>1</sup> Pasal 83 ayat 6 AD/ART PDI Perjuangan

Hermanto Rohman menyebutkan bahwa seorang perempuan akan mendapat peluang yang sangat besar ketika masyarakatnya demokratis dan dengan terciptanya pemerintahan demokratis pula<sup>2</sup>. Dengan dilahirkannya affirmative action akan lebih menjamin kehidupan demokrasi yang lebih baik. Penerapan kebijakan ini dinilai perlu untuk memberi kesempatan yang seluas-luasnya bagi perempuan. Seperti yang diungkapkan Novi Sukmawati Caleg PDI Perjuangan

“Jika pada jaman orde baru perempuan selalu di kesampingkan untuk urusan politik maka setelah tumbang orde baru yaitu masa reformasi maka baru muncul peraturan mengenai affirmative action itu [ada tahun 2003. Perempuan zaman sekarang sudah diberikan keleluasaan sehingga ruang lingkup perempuan tidak hanya kamar, Kasur dan dapur saja melainkan ke ruang lingkup yang lebih besar yaitu ruang lingkup publik. Adanya affirmative action ini menjadi suatu jaminan bagi perempuan untuk lebih leluasa dalam berpolitik” (Wawancara 13 Juni 2019)

Lahirnya undang-undang terkait 30% minimal keterwakilan perempuan dalam pencalonan legislatif memberikan angin segar bagi perempuan untuk dapat lebih berpartisipasi dalam politik khususnya di Lembaga legislatif, makin banyak perempuan yang terjun ke bidang politik maka makin besar pula peluang untuk mencegah terjadinya diskriminasi terhadap perempuan di masyarakat dan juga di dunia kerja.

Secara umum terdapat tiga faktor yang cukup berpengaruh terhadap keterwakilan perempuan dalam politik yaitu sistem pemilu, partai politik serta affirmative action. Dari ketiga faktor salah satu cara yang dianggap paling efektif untuk meningkatkan daya saing perempuan dalam politik dan pengambilan keputusan adalah

---

<sup>2</sup> Hermanto Rohman, *Masa depan politik perempuan*, dalam HARIAN KOMPAS. Rabu 10 maret 2010

dengan affirmative action. Affirmative action adalah sebuah alat penting untuk mempertahankan paling tidak 30 persen perempuan agar tetap berada pada tingkat pembuat keputusan <sup>3</sup>, Seperti yang di sampaikan Lely Purwandari Caleg PDI Perjuangan

“affirmative action ini bagi kami merupakan suatu peraturan yang mendukung perempuan-perempuan di Indonesia untuk lebih mudah dalam berpartisipasi di bidang politik, seperti yang kita ketahui sebelum adanya peratuean ini banyak partai-partai yang kental akan unsur patriarkinya, banyak pula perempuan yang tidak dapat ter akomodasi dengan baik di dalam partai politik dengan system yang seperti dulu. Tetapi kini dengan adanya peraturan ini dapat memacu partai untuk lebih giat lagi mencari anggota dan kader perempuan tapi pencarian kader dan anggota jangan asal ambil comot saja untuk memenuhi peraturan 30% tetapi partai harus benar-benar memperhitungkan betul kemampuan perempuan yang di rekrut. Peraturan ini juga saya harapkan dapat perlahan-lahan bisa menghilangkan kultur patriarkis di partai politik, hingga tujuan akhirnya adalah meningkatkan partisipasi politik perempuan di parlemen yang nantinya juga akan membawa kebermanfaatn bagi perempuan” (Wawancara 6 Mei 2019)

Dengan adanya kebijakan affirmative action ini menandakan kemajuan dalam dunia perpolitikan Indonesia, kebijakan yang semakin responsif gender semakin mempermudah akses perempuan untuk ikut andil dalam dunia politik. Faktor penting pendukung suksesnya implementasi kebijakan tersebut, khususnya kebijakan keterwakilan perempuan, tidak hanya dari kaum wanita itu sendiri melainkan juga berasal dari partai politik peserta pemilu. Pada pemilu-pemilu sebelumnya banyak partai yang kurang memperhatikan kebijakan keterwakilan perempuan. Mereka menganggap hal tersebut hanya sekedar anjuran atau himbauan yang tidak mengikat

---

<sup>3</sup> Ratnawati. 2004. Potret Perempuan di Parlemen. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 7,

karena tidak ada sanksi hukum bagi pelanggarannya. Hal itu menjadi salah satu penyebab kurangnya keterwakilan perempuan dalam parlemen

PDI Perjuangan sebagai partai politik tentunya memerlukan kehadiran dan peran perempuan bukan hanya sebagai upaya untuk memenuhi persyaratan yang di berikan KPU tapi juga ingin memberikan kesempatan yang lebih bagi perempuan, kebijakan yang proterhadap perempuan ini dianggap baik bagi kader perempuan karna dinilai dapat lebih mengupayakan keterwakilanya di dalam partai politik mapun dalam Lembaga legislatif seperti yang dikatakan Diah Harimurti, Snggota PDI Perjuangan Kota Semarang

“Kebijakan affirmative bagi perempuan amatlah penting karna dengan adanya kebijakan affirmative ini lebih menjamin posisi dan kedudukan perempuan secara politis ditambah lagi dengan sisttem pemilu yang menggunakan system proposional terbuka ini jika dibandingkan dengan pemilu-pemilu sebelumnya. Memang dalam affirmative action ini baru berbicara tentang aturan batas minimal keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai dan pencalonan legislatif, dalam affirmative action yang ada di Indonesia belum mengatur hal-hal yang secara spesifik mengarah pada peningkatan jumlah keterpilihan calon legislatif dalam pemilu, tetapi hal ini juga sudah baik, DPC PDI Perjuanganpun juga sangat mengakomodasi kader-kader perempuannya dan memberikan akses yang cukup untuk perempuan sama-sama berpartisipasi dan berjuang bersama kader laki-laki untuk kepentingan masyarakat” (Wawancara 30 Desember 2018)

Afirmatife action bagi perempuan adalah suatu langkah untuk menuju demokrasi yang lebih maju dimana keterwakilan perempuan sudah mulai dipertimbangkan walau dalam kebijakan ini masih dalam tataran pemenuhan kepengurusan dalam partai sebanyak 30% dan dalam pencalonan legislatif juga

sebanyak 30%. Perlu di ingat bahwa sangatlah penting jika perempuan dan laki-laki terlibat secara penuh dan aktif dalam proses dan pengambilan keputusan politik sebuah negara. Hak setara perempuan dan laki-laki dalam kehidupan politik, ekonomi, dan sosial serta nondiskriminasi adalah prinsip hak asasi manusia yang sangat penting. Ini adalah hak-hak yang diabadikan dalam peraturan hak asasi manusia tingkat regional dan internasional yang bersumber dari Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948, yang menyatakan dari awal di Pasal 1, bahwa “semua manusia lahir dengan martabat dan hak yang setara.”<sup>4</sup>

Pada prinsipnya, partisipasi penuh perempuan dalam proses politik dan pemilihan bukanlah sesuatu yang penyelenggara pemilu harus mencapainya hanya karena itu adalah hak asasi dasar; namun, melibatkan perempuan memiliki dimensi praktis yang masuk akal. Gagalnya melibatkan perempuan dapat berarti melewatkan sebuah kesempatan besar untuk menghadirkan pemilu yang bebas dan adil dan membangun masyarakat yang inklusif, demokratis, dan makmur.

### **3.2. Rekrutmen Anggota Perempuan**

Partai politik adalah suatu organisasi berperan penting dalam mencetak calon pemimpin bangsa yang berkualitas dan berideologis. Fungsi partai sebagai sarana rekrutmen politik merupakan fungsi yang penting, baik untuk keberlangsungan

---

<sup>4</sup> Perencanaan Strategis untuk Manajemen Pemilihan Efektif, IFES, Oktober 2011.

kepengurusan partai politik itu sendiri maupun untuk mencetak seorang pemimpin bangsa dan wakil rakyat yang berkualitas.

Lahirnya seorang pemimpin yang berkualitas berawal dengan adanya suatu seleksi kepemimpinan. Seleksi kepemimpinan yaitu menyelenggarakan pemilihan pemimpin atau calon pemimpin bagi masyarakat. Penyelenggaraan seleksi ini dilakukan secara terencana dan teratur berdasarkan hukum kemasyarakatan dan norma serta harapan masyarakat (Kantaprawira, 2004:60).

Rekrutmen politik yang ada pada system politik di Indonesia, yaitu rekrutmen politik untuk mengisi jabatan publik baik di eksekutif maupun legislatif seperti sebagai calon anggota DPR RI dan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, calon Presiden dan wakil Presiden, serta calon kepala daerah dan wakil kepala daerah mulai tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota. Untuk memastikan adanya suksesi kepemimpinan yang baik, haruslah menggunakan satu sistem rekrutmen politik yang terbuka<sup>5</sup>.

Setiap wakil rakyat dituntut untuk memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat Terdapat dua teori klasik yang berkaitan antara hubungan wakil rakyat dan rakyat yang di wakili, yaitu teori mandate(functional representation) dan teori kebebasan (*political representation*). Dalam teori mandat yang dikemukakan oleh J.J Rouseau menggambarkan bahwa wakil rakyat dilihat sebagai penerima mandat dimana ia harus merealisasikan kekuasaan pihak yang

---

<sup>5</sup> Miriam Budiarmo, 2008, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Jakarta; Gramedia

diwakilinya dalam proses kehidupan politik. menurut teori ini, tindakan wakil di lembaga perwakilan harus sesuai dengan instruksi yang diberikan oleh pihak yang diwakilinya. oleh karena itu pandangan, sikap dan tindakan wakil harus sejalan dengan mandat yang diberikan Dalam teori kebebasan, wakil dianggap perlu merumuskan sikap dan pandangannya tentang masalah yang dihadapi tanpa terikat secara ketat kepada terwakil. Karena diakuinya kebebasan wakil dalam melaksanakan tugasnya, maka wakil seperti itu disebut pula sebagai wakil yang bertipe wali dan sebaliknya wakil yang didasarkan kepada teori mandat disebut sebagai wakil yang bertipe utusan<sup>6</sup>.

Di negara demokratis setiap orang yang sudah memenuhi syarat untuk mengisi suatu jabatan politik dengan cara dipilih oleh rakyat mempunyai peluang yang sama dalam melakukan kompetisi untuk mengisi jabatan tersebut dengan mengikuti pemilu, sedangkan di negara yang tidak demokratis, rekrutmen politik dilakukan secara tertutup. Artinya, peluang untuk mengisi jabatan politik hanya dimiliki oleh beberapa gelintir orang saja dan sangat sedikit untuk rakyat sipil dapat mengisi jabatan publik. Fungsi partai politik sebagai sarana rekrutmen politik dibedakan antara rekrutmen politik di negara demokrasi dan rekrutmen di negara otoriter. Fungsi rekrutmen politik di negara demokratis, fungsi ini berkaitan erat dengan masalah seleksi kepemimpinan, baik kepemimpinan internal partai maupun kepentingan nasional yang lebih luas. Untuk kepentingan internalnya, setiap partai butuh kader-kader yang berkualitas karena hanya dengan kader yang demikian ia dapat menjadi partai yang mempunyai

---

<sup>6</sup> Subakti, Ramlan. 2010. Memahami Ilmu Politik. Jakarta. Gramedia

kesempatan lebih besar untuk mengembangkan diri. Dengan mempunyai kader-kader yang baik, partai tidak akan sulit menentukan pemimpinnya sendiri dan mempunyai peluang untuk mengajukan calon untuk masuk ke bursa kepemimpinan nasional<sup>7</sup>. Sedangkan di negara otoriter, partai politik juga berfungsi sebagai sarana rekrutmen politik. Akan tetapi dalam hal ini ia mengutamakan orang yang mempunyai kemampuan untuk mengabdikan kepada partai, yang menguasai ideologi Marxisme-Leninisme, dan yang kelak mampu menduduki kedudukan pimpinan untuk mengawasi kegiatan dari berbagai aspek kehidupan masyarakat. Karena iklim politik tidak kompetitif maka pemilihan umum tidak merupakan sarana untuk memilih pimpinan negara, tetapi lebih bersifat sebagai tanda bukti dari loyalitas rakyat kepada negara dengan memilih calon yang ditentukan oleh partai<sup>8</sup>

Rekrutment politik dilakukan oleh PDI Perjuangan dengan memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi setiap masyarakat, tak terkecuali oleh seorang perempuan. Rekrutment calon legislatif perempuan sangatlah penting. Dengan adanya perekrutan calon legislatif seorang perempuan yang sesuai dengan peraturan perUndang-undang akan memberikan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk beraspirasi dalam dunia politik. Pemilihan atau seleksi calon legislatif perempuan sangat dibutuhkan karena dengan adanya perekrutan calon legislatif seorang

---

<sup>7</sup> Miriam Budiarmo, 2008, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Jakarta; Gramedia

<sup>8</sup> Miriam Budiarmo, 2008, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Jakarta; Gramedia



perempuan yang sesuai dengan Undang-undang akan memberikan peluang yang sama bagi perempuan untuk memenuhi kepinginan perempuan dalam dunia politik .

Rekrutmen anggota di PDI Perjuangan Kota Semarang didasarkan pada peraturan partai seperti yang di ungkap oleh Untung pengurus harian DPC PDI Perjuangan DPC Kota Semarang

“Pelaksanaan rekrutmen anggota PDI Perjuangan baik di Kota Semarang maupun di kota lain haruslah berdasarkan pada aturan-aturan yang berlaku dalam partai, yaitu AD/ART PDI Perjuangan dan SK Nomor 101/KPTS/DPP/I/2007 yang berkaitan dengan Sistem Penerimaan Anggota”(Wawancara 28 Desember 2018)

PDI Perjuangan melakukan rekrutmen terhadap Warga Negara Indonesia untuk menjadi anggota PDI Perjuangan. Setiap orang dapat mendaftarkan diri sebagai anggota PDI Perjuangan dengan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Partai. Anggota Partai adalah Warga Negara Indonesia yang secara sukarela menyatakan diri untuk menjadi anggota dan telah dinyatakan memenuhi persyaratan sebagai anggota PDI Perjuangan. Dalam melakukan rekrutmen terhadap calon anggota. PDI Perjuangan memberikan kesempatan sebesar-besarnya bagi masyarakat untuk mendaftarkan diri sebagai anggota baik untuk calon anggota laki-laki maupun calon anggota perempuan

Rekrutmen anggota adalah tanggung jawab bersama setiap pengurus PDI Perjuangan di berbagai tingkat kepengurusan, Seperti yang di ungkapkan oleh Untung

“Rekrutmen anggota baru dilakukan oleh setiap kepengurusan Partai di tiap tingkat kepengurusannya mulai dari tingkat anak ranting hingga tingkat Dewan Pimpinan Cabang dengan menggerakkan anggota dan kadernya untuk mencari calon anggota baru. Jika masyarakat biasa tertarik ingin bergabung menjadi anggota PDI Perjuangan dengan inisiatif pribadi dapat pula mendaftar di

berbagai tingkatan mulai dari Anak ranting hingga tingkat Dewan Pimpinan Cabang”(Wawancara 28 Desember 2018)

Laki-laki dan perempuan yang ingin menjadi anggota PDI Perjuangan mengikuti pola rekrutment yang sama. Pola rekrutmen yang dilakukan PDI Perjuangan DPC Kota Semarang terbagi dari dua cara, pertama adalah inisiatif pribadi untuk bergabung menjadi anggota dari partai. Cara yang ini sangat memudahkan partai untuk mendapatkan anggota-anggota baru yang ada di masyarakat, tetapi dengan cara yang seperti ini tidak bisa dipastikan apakah calon anggota yang bergabung mempunyai kualitas yang baik atau tidak karena belum di ketahui rekam jejaknya sebelumnya. Cara ini lebih menjanjikan dari segi kwanritas daripada kualitas calon kader. Kedua, PDI Perjuangan aktif turun ke berbagai lapisan masyarakat untuk mencari calon anggota yang memiliki potensi yang mumpuni di bidang akademis juga aktif mencari tokoh masyarakat yang memiliki pengaruh besar di lingkungannya. Dengan cara ini mesin partai harus bekerja sangat keras dan terjun langsung ke segala lapisan masyarakat untuk menemukan calon-calon kadernya yang memang memiliki potensi yang mumpuni, Cara ini lebih menjannjikan di segi kualitas daripada kwantitas calon kader, Seperti yang dikatakan Lely Purwandari

“Dalam merekrut perempuan PDI Perjuangan menggunakan dua cara yaitu setiap kader perempuan mengajak perempuan yang lain untuk ikut bergabung menjadi bagian dari PDI Perjuangan pola pendekatannya ke masyarakat yang bermacam-macam mulai dari arisan, pengajian, dan pelatihan keterampilan, sedikit-sedikit di selipkan tentang mteri kepartaian dan kebangsaan yang di harapkan perempuan calon kader tersebut tertarik untuk bergabung bersama PDI Perjuangan, Tidak hanya perempuan biasa saja yang kami ajak untuk bergabung tetapi perempuan-perempuan yang memiliki pengaruh besar atau menjadi tokoh masyarakat juga kami ajak untuk ikut bergabung bersama PDI

Perjuangan untuk lebih mengabdikan pada masyarakat utamanya perempuan lewat jalur politis, Cara rekrutmen kami yang cukup banyak mendapatkan anggota perempuan adalah dengan menerima perempuan yang masuk PDI Perjuangan atas dasar kemauan pribadi perempuan tersebut, ada banyak faktor yang melatar belakangi mereka bergabung dengan PDI Perjuangan mulai dari komitmen partai terhadap masyarakat kecil utamanya perempuan dan anak hingga persamaan tujuan dan cara berpolitik” (Wawancara 6 Mei 2019)

Undang-Undang No 2 Tahun 2011 mengharuskan setidaknya terdapat tigapuluh persen keterwakilan perempuan dalam partai politik sehingga setiap partai peserta pemilu wajib mengikuti peraturan tersebut seperti pada DPC PDI Perjuangan Kota Semarang yang selalu memenuhi peraturan tersebut dengan memberikan kesempatan sebesar-besarnya bagi perempuan untuk ikut serta dalam kegiatan partai Seperti yang dikatakan Untung pengurus DPC PDI Perjuangan Kota Semarang

“Sejak dulu PDI Perjuangan selalu memberikan kesempatan sebesar-besarnya bagi perempuan untuk bersama-sama mengembangkan dan memajukan partai. Hanya saja terdapat beberapa faktor yang menghambat partisipasi politik perempuan baik karena faktor internal dan faktor eksternal. Aktifitas politik untuk perempuan juga terbatas tidak bisa sebebaskan aktifitas politik yang dilakukan laki-laki, Padahal banyak kegiatan Partai yang harus diikuti. Hal tersebut yang membuat partisipasi perempuan tidak dapat maksimal padahal partai sudah memberikan cukup ruang bagi perempuan. UU No 2 Tahun 2011 bukanlah menjadi suatu tantangan bagi PDI Perjuangan terbukti dari limabelas anggota fraksi PDI Perjuangan di DPRD Kota Semarang terdapat enam perempuan, dan dari delapan belas orang pengurus partai di tingkat DPC terdapat enam orang perempuan, Sedangkan dalam kepengurusan tingkat anak cabang dengan pengurus sejumlah sebelas orang maka minimal harus ada empat orang perempuan dalam struktur kepengurusan. Cukup banyaknya perempuan yang berda dalam kepengurusan DPC merupakan komitmen partai untuk menyamakan hak antara perempuan dengan laki-laki” (Wawancara 28 Desember 2018)

Dalam merekrut calon anggota perempuan PDI Perjuangan tidak mengalami kesulitan karena tiap tahunnya PDI Perjuangan selalu menerima banyak anggota perempuan, hal ini dikarenakan masyarakat merasakan hasil kerja nyata yang

dilakukan kader-kader partai dan komitmen partai untuk mebelas *wong cilik*. Banyaknya pengurus perempuan dan Anggota legislatif perempuan menjadikan inspirasi untuk perempuan lainnya untuk bergabung menjadi anggota PDI Perjuangan, di tambah lagi jawa tengah dulunya adalah basis dari Partai Nasionalis Indonesia. (PNI) besutan Ir. Soekarno yang juga merupakan partai politik yang disatukan dengan beberapa partai lain hingga menjadi Partai Demokrasi Indonesia, PDI Perjuangan juga merupakan partai terbesar di Kota Semarang dengan memperoleh suara sebanyak

Salah satu figure yang banyak mempengaruhi perempuan untuk bergabung menjadi anggota PDI Perjuangan Kota Semarang adalah Megawati Sukarnoputri yang merupakan Ketua Umum PDI Perjuangan dan juga merupakan mantan Presiden Republik Indonesia yang ke lima, dan sekaligus menjadi perempuan pertama dan satu-satunya yang pernah menjadi Presiden Republik Indonesia, Sama halnya seperti yang di ungkapkan Lely Purwandari

“Awal saya bergabung ke PDI Perjuangan dikarenakan melihat ketokohan dari Ibu Megawati Soekarno Putri karna bagi saya beliau adalah cerminan perempuan yang Tangguh yang bekerja nyata untuk masyarakat, pada masa kekuasaan orde baru yang otoriter banyak aktivis yang ditahan dan tak sedikit yang diculik. Perbedaan pandangan politik saat itu adalah hal yang haram untuk dilakukan, tetapi dengan usaha dan keberaniannya Ibu Mega melawan orde baru hingga membuat kalang-kabut pemerintahan orba, bahkan partai kami yang saat itu masih PDI saja mulai di gembosi soeharto pada tahun 1996 hingga puncaknya pada kerusuhan di kantor DPP PDI pada tahun 1997. Tapi dengan kepemimpinan yang baik dari ibu Mega yang dapat menyelesaikan konflik internal dan menyelamatkan PDI dari konflik yang lebih besar sampai akhirnya menjadi PDI Perjuangan dan bertahan hingga sekarang” (Wawancara 6 Mei 2019)

Pendapat yang sama juga di sampaikan oleh Diah Hari Murti yang juga merupakan Anggota legislatif Kota Semarang

“Ketertarikan saya di bidang politik bermula saat melihat kiprah dan figure Megawati di kancah perpolitikan nasional dan sumbangsih bagi bangsa dan negara, ditambah lagi pengalaman saya saat menjemput Megawati di bandara Bersama ayah saya, disana saya melihat begitu banyak orang-orang pemuda dan pemudi yang menggunakan atribut berlambang banteng. Saya yang pada saat itu masih duduk di bangku SMA Sejak saat itu mulai tertarik dan mulai rutin mencari tau informasi ataupun hal-hal yang berbau tentang politik lewat media Televisi, Koran dan majalah.” (Wawancara 31 Desember 2018)

Kebanyakan calon legislatif perempuan yang tertarik bergabung menjadi kader PDI Perjuangan didorong oleh faktor ketokohan Megawati Soekarno Putri sebagai Ketua Umum partai sekaligus menjadi gambaran seorang perempuan yang berani dan visioner. Megawati juga menjadi tokoh yang banyak di idolakan dan menjadi inspirasi untuk perempuan terjun ke bidang politik. Ketertarikan perempuan pada bidang politik bukan hanya karna Megawati saja tetapi di dasarkan pada faktor keluarga yang sebelumnya juga merupakan bagian/kader dari PDI Perjuangan seperti yang di ungkapkan oleh Novi Sukmawati Caleg PDI Perjuangan

“Dari awal keluarga saya sudah masuk dalam dunia politik mulai dari almarhum ayah saya dan kemudian ibu saya, bapak bergabung ke PDI Perjuangan pada tahun 1977 saat itu masih PDI, ibu juga merupakan ketua Biro wanita. Kedua orang tua saya memulai karir politik benar-benar dari bawah mulai dari korcam atau yang saat ini disebut Pengurus Ranting hingga menduduki posisi sebagai wakil ketua bidang di kepengurusan DPC. Sejak saya SD saya sudah ikut orangtua saya untuk berkeliling/ safari politik itulah yang membuat saya tertarik ke dalam dunia politik, kebetulan saya anak pertama jadi saya merasa memiliki tanggung jawab untuk melanjutkan perjuangan orangtua saya membela rakyat.”(Wawancara 13 Juni 2019)

### **3.2.1. Keanggotaan PDI Perjuangan**

Anggota PDI Perjuangan terdiri atas anggota biasa, anggota, kader dan anggota kehormatan. Anggota biasa adalah adalah warga negara Indonesia yang telah mendaftarkan diri dan telah memenuhi syarat-syarat keanggotaan Partai serta dinyatakan diterima sebagai anggota biasa partai oleh pimpinan partai. Anggota partai adalah anggota biasa partai yang telah mengikuti pelatihan, pendidikan dan pembinaan yang dilaksanakan oleh partai. kader partai adalah anggota partai yang telah dinyatakan lulus dari pendidikan kader partai dan/ atau telah teruji dedikasi, loyalitas, dan pengabdianya kepada Partai dan masyarakat umum. Dalam kader partai terdapat beberapa tingkatan yaitu Kader Pratama, Kader Madya dan Kader Utama. Di luar jenjang kader Partai mempersiapkan Warga Negara Indonesia yang memiliki kecakapan profesional tertentu untuk ditetapkan sebagai Anggota Partai dalam rangka ditugaskan pada lembaga politik dan lembaga publik serta kelembagaan yang bersifat strategis lainnya, setelah mengikuti Sekolah Partai atau pendidikan kader yang bersifat khusus. Dan Anggota Kehormatan Partai adalah Warga Negara Indonesia yang berjasa luar biasa kepada Partai dan pandangan serta sikap hidupnya tidak bertentangan dengan Asas, Jati Diri, Watak, dan Tujuan Partai. Hal ini menandakan bahwa tidak ada larangan bagi perempuan untuk mejadi anggota PDI Perjuangan

### **3.2.2. Persyaratan Menjadi Anggota PDI Perjuangan**

Jenjang keanggotaan PDI Perjuangan yang paling awal adalah anggota biasa partai. Pada jenjang keanggotaan ini setiap orang dapat bergabung dan memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi anggota biasa partai asalkan memenuhi persyaratan yang diberikan oleh partai

Untuk menjadi anggota PDI Perjuangan di berbagai tingkat keanggotaan baik laki-laki maupun perempuan harus berdasarkan pada AD/ART PDI Perjuangan dan berdasar pada peraturan Partai yang berlaku. Masyarakat yang ingin menjadi anggota di berbagai tingkatan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut

1. Merupakan seorang warga negara Republik Indonesia yang sekurang-kurangnya telah berumur tujuh belas tahun.
2. Setiap calon anggota juga harus mematuhi dan menaati Piagam perjuangan partai, mukadimah partai, anggaran dasar dan rumah tangga (AD/ART) partai
3. Bersedia mengikuti kegiatan Partai sesuai instruksi Partai.
4. Bersedia mematuhi dan menegakan disiplin partai, bersedia mengikuti instruksi dari partai.
5. Bersedia menyatakan diri secara tertulis sebagai Anggota Biasa, dan menyampaikannya kepada Dewan Pimpinan Partai atau melalui Sistem Penerimaan Anggota yang disiapkan oleh DPP Partai
6. Bersedia memenuhi persyaratan administrasi persyaratan lainnya yang telah ditentukan oleh Partai

Setelah menjadi anggota partai biasa, anggota biasa dapat meningkatkan setatus keanggotaannya menjadi Anggota Partai, PDI Perjuangan membuka peluang sebesar-besarnya bagi setiap anggota biasa untuk dapat menjadi anggota partai tanpa membedakan jenis kelamin, baik laki-laki maupun perempuan memiliki peluang dan kesempatan yang sama untuk menjadi anggota partai adapun persyaratannya adalah

1. Setiap Anggota Biasa Partai wajib mengikuti pendidikan, pelatihan dan pembinaan yang dilaksanakan Partai di wilayahnya.
2. Selama masa pelatihan, pendidikan dan pembinaan, Partai memberikan materi ideologi Partai dan pendidikan politik dasar kepada Anggota Biasa berdasarkan kurikulum pendidikan dan pelatihan Partai.
3. Anggota Biasa yang telah melalui tahap pendidikan, pelatihan dan pembinaan, mendapatkan rekomendasi dari DPC Partai, dan selanjutnya dilantik menjadi Anggota dan wajib mengucapkan sumpah atau janji sebagai Anggota Partai.
4. Pengesahan seseorang menjadi Anggota Partai diputuskan oleh DPC Partai.
5. Setiap anggota biasa yang telah ditetapkan sebagai anggota Partai diberikan Kartu Tanda Anggota Partai oleh DPC Partai.
6. Bentuk, pengesahan, dan registrasi penomoran Kartu Tanda Anggota diatur dalam Peraturan Partai.
7. Pengurus Ranting, Pengurus Anak Cabang dan DPC Partai berkewajiban menghimpun, memverifikasi dan mendata keanggotaan Partai di wilayahnya.
8. Persyaratan terakhir adalah Keanggotaan Partai akan dilaporkan DPC Partai kepada DPP Partai untuk disimpan dan diarsipkan di Pusat Analisa dan Pengendali Situasi DPP Partai.



Setelah menjadi anggota partai untuk meningkatkan jenjang keanggotaannya para anggota partai wajib mengikuti kaderisasi yang dilakukan oleh partai yang dilakukan secara berkala. Sama halnya dengan jenjang-jenjang keanggotaan yang sebelumnya PDI Perjuangan membuka kesempatan sebesar-besarnya dan memberikan kesempatan yang sama bagi setiap anggotanya untuk mengikuti kaderisasi, baik itu anggota laki-laki maupun anggota perempuan partai memberikan persyaratan yang sama di antaranya adalah

1. Telah memiliki kemantapan ideologi, politik, dan kemampuan berorganisasi yang tinggi.
2. Telah membuktikan kesetiaan dan ketaatan kepada Partai.
3. Telah membuktikan kemampuannya menggerakkan dan/atau melaksanakan kegiatan dalam jajaran Partai dan/atau dalam masyarakat.
4. Memiliki moral yang baik.
5. Telah lulus pendidikan kader yang diselenggarakan oleh Partai.

Jenjang keanggotaan yang tertinggi pada kepengurusan PDI Perjuangan adalah Anggota kehormatan partai. Tidak semua orang bisa mendapatkan status sebagai anggota kehormatan partai karna hanya orang-orang yang dinilai memberikan manfaat atau pengaruh besar terhadap kepentingan masyarakat dan perkembangan partai yang mendapatkan status ini. Penetapa status sebagai anggota kehormatan partai tidak dinilai berdasarkan lama keanggotaan partai, maupun jenis kelamin anggota tapi benar-benar menekankan pada keamfaatan anggota kehormatan tersebut bagi kepentingan masyarakat dan perkembangan partai tersebut adapun syarat menjadi anggota biasa adalah

1. Calon Anggota Kehormatan diusulkan oleh Dewan Pimpinan Partai kepada DPP Partai
2. Tidak berstatus sebagai anggota Partai
3. Berjasa besar dalam upaya pemenangan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden
4. Berperan penting dalam membantu Partai dalam meningkatkan kesejahteraan anggota Partai
5. Berperan penting ikut mewujudkan program-program strategis Partai.
6. Berjasa besar dalam menjaga eksistensi dan soliditas Partai
7. Penetapan anggota kehormatan melalui keputusan DPP Partai.

PDI Perjuangan dalam setiap proses perekrutannya di berbagai tingkatan tidak memiliki peraturan khusus yang memudahkan perempuan untuk menjadi anggota PDI Perjuangan. Peraturan yang dibuat untuk perekrutan didasarkan kepada kesetaraan kedudukan antara laki-laki dengan perempuan dan tidak ada perlakuan khusus bagi perempuan dalam proses perekrutan

### **3.3. Kaderisasi Perempuan PDI Perjuangan**

Kaderisasi merupakan proses penyeleksian masyarakat untuk ikut kedalam kegiatan politik dan pengisian jabatan pemerintahan, kaderisasi kepemimpinan adalah proses mempersiapkan seseorang menjadi pemimpin di masa depan yang memiliki peran sangat penting bagi perkembangan dan pembangunan bangsa. Maka dari itu, proses kaderisasi kepemimpinan ini menitik beratkan pada sebuah proses untuk mengarahkan sekelompok orang untuk menuju ke suatu tujuan yang telah ditetapkan Bersama tanpa adanya paksaan

Dalam perpolitikan nasional, proses kaderisasi ini digunakan untuk menyiapkan seorang warga negara atau sekelompok masyarakat yang hanya ingin bergabung menjadi anggota partai dan bahkan menjadi seorang pimpinan politik baik di tingkat local maupun nasional. Pada pemilu legislatif kota Semarang 2019 partai PDI Perjuangan telah melakukan proses kaderisasi untuk menyiapkan kader-kader terbaiknya untuk menduduki kursi di DPRD Kota Semarang. Setiap kader membutuhkan kaderisasi guna menambah pemahaman mereka mengenai ideologi kepartaian dan pemahaman kebangsaan. Kaderisasi ini juga sangatlah penting bagi kader perempuan agar kader perempuan lebih dapat bersaing dengan kader laki-laki, Seperti yang di ungkapkan Novi Sukmawati Caleg PDI Perjuangan.

“PDI Perjuangan memiliki beberapa program untuk meningkatkan kualitas kader perempuan yaitu dengan kaderisasi, kaderisasi PDI Perjuangan dilaksanakan secara bertahap mulai dari tingkat PAC,DPC, DPD dan DPP. Kita juga memiliki organisasi onderbouw khusus perempuan di tingkat kota Namanya adalah Departemen Wanita, Departemen wanita sendiri dibentuk untuk memudahkan komunikasi antar kader perempuan, pelaksanaan kegiatan dan program partai dan membantu tugas-tugas partai. Selama ini Departemen wanita berfokus pada bidang social kemasyarakatan salah satunya seperti Bakti social, dan dengan adanya Departemen Wanita ini akan memberikan kebermanfaatan bagi masyarakat yang umpan baliknya nanti masyarakat perempuan akan bergabung menjadi anggota/kader PDI Perjuangan.” (Wawancara 13 Juni 2019)

Sistem kaderisasi partai haruslah disertai dengan sistem yang transparan sehingga dapat memberikan jaminan akses untuk semua kader yang memiliki kualitas dan potensi. Perlu juga di munculkan sistem persaingan yang sehat dan transparan dalam tubuh partai agar kader partai terbiasa dengan sistem tersebut maka kaderisasi akan melahirkan calon-calon pemimpin yang berkualitas

Pelaksanaan kaderisasi di PDI Perjuangan dilakukan dengan dua acara yaitu melalui Pendidikan kader dan pelatihan kader (Diklat) yang telah ditentukan oleh partai. Kaderisasi di PDI Perjuangan dilakukan secara berjenjang mulai dari kaderisasi tingkat pertama yang dilakukan oleh DPC, kaderisasi madya yang dilakukan DPD dan yang paling akhir adalah kaderisasi madya yang dilakukan tingkat DPP. Materi dalam kaderisasi adalah materi yang bersifat umum seperti penanaman ideologi kenegaraan, Sedangkan materi yang khusus mengenai partai adalah sejarah dan perjuangan partai, program-program partai, dan garis-garis kebijakan partai. Seperti yang disampaikan oleh Untung pengurus DPC PDI Perjuangan Kota Semarang.

“Kaderisasi yang dilakukan PDI Perjuangan bertujuan untuk memberikan pemahaman politik terkait Sejarah partai, ideologi partai dan garis-garis kebijakan partai. Dalam kaderisasi tidak hanya materi terkait kepartaian saja yang diberikan tapi juga diberikan wawasan tentang pemerintahan yang materinya diberikan langsung oleh pemateri yang kompeten bisa dari bidang eksekutif, legislatif dan yudikatif jadi tidak heran jika pada saat pelaksanaan kaderisasi yang memberikan materi adalah seorang kepala daerah bahkan menteri-mentri, hal ini dilakukan agar kader mengetahui pasti kebijakan-kebijakan pemerintah langsung dari pejabat pembuat keputusan itu atau pemerintah” (Wawancara 28 Desember 2018)

Proses kaderisasi di DPC PDI Perjuangan Kota Semarang menjadi tanggungjawab dari Wakil Bidang Organisasi, Keanggotaan, rekrutmen dan kaderisasi. Dalam kaderisasi ini PDI Perjuangan Kota Semarang tidak pernah mengalami kesulitan untuk mendapatkan calon kadernya utamanya calon kader perempuan karna PDI Perjuangan Kota Semarang memiliki sangat banyak anggota perempuan sebagaimana yang dikatakan oleh Untung

“PDI Perjuangan Kota Semarang tidak pernah mengalami kesulitan dalam proses kaderisasinya karna kami memiliki cukup banyak anggota dan khususnya anggota perempuan yang kami miliki jumlahnya juga tidak sedikit. Kinerja dari tiap kepengurusan baik dari tingkat ranting hingga anak cabang juga mempengaruhi banyaknya anggota yang mengikuti proses kaderisasi mereka selalu berusaha untuk mendorong anggota berpartisipasi lebih dalam Partai PDI Perjuangan. Termasuk juga perempuan, perempuan juga di upayakan mengikuti kaderisasi agar mendapat pemahaman lebih mengenai pemerintahan dan kepartaian. Dilakukanya Kaderisasi harus di sesuai agenda dan kebutuhan partai, di PDI Perjuangan Kota Semarang sendiri biasanya kaderisasinya dilaksanakan tiap satu tahun sekali atau dua tahun sekali karna banyaknya agenda partai. Untuk menyiasatinya partai aktif untuk melakukan konsolidasi dimana para pengurus cabang turun langsung ke pengurus anak cabang distu disampaikan berbagai program dan kebijakan partai, konsolidasi ini juga merupakan tempat PAC untuk menyampaikan usulan atau gagasan terkait kebijakan partai.” (Wawancara 28 Desember 2018)

Kadeisasi bagi perempuan sangatlah penting karna dengan mengikuti kaderisasi maka makin banyak wawasan mengenai kepartaian dan menambah wawasan kebangsaan serta memungkinkan perempuan tersebut untuk lebih berpartisipasi dalam kepengurusan partai dengan menjadi pengurus partai mulai dari kepengurusan tingkat anak cabang hingga kepengurusan tingkat cabang dan tidak menutup kemungkinan jika kader perempuan tersebut memiliki kwaltas yang unggul maka dapat menduduki jabatan di kepengurusan tingkat DPD hingga jabatan di kepengurusan tingkat DPP. Manfaat kader perempuan lainnya adalah sebagai sarana mengefektifkan komunikasi politik dengan masyarakat khususnya sesama perempuan karna, perempuan akan lebih nyaman jika berhadapan dengan sesama perempuan dibandingkan dengan kader laki-laki. Seperti yang dikatakan Lely Purwandari Caleg PDI Perjuangan Kota Semarang

“sangatlah penting bagi anggota perempuan PDI Perjuangan untuk mengikuti kaderisasi, jika dilihat kepengurusan partai saat ini masih di dominasi oleh laki-laki sedangkan jumlah anggota perempuan PDI Perjuangan sangatlah banyak, dengan mengikuti kaderisasi maka membuka peluang yang lebih besar untuk perempuan dapat menduduki posisi-posisi yang strategis di dalam internal kepengurusan partai, dengan banyaknya perempuan yang duduk di kepengurusan partai maka partai akan dapat lebih maksimal memberikan program-program kepada masyarakat terkait kewanitaan, yang ujung-ujungnya nanti itu juga bisa dijadikan cara untuk rekrutmen anggota perempuan yang baru, dengan makin banyaknya perempuan yang bergabung maka makin besar PDI Perjuangan di kota Semarang, manfaat kaderisasi tidak hanya pada kepengurusan partai tapi juga meningkatkan pengetahuan anggota perempuan terkait dunia politik, problematika dan upaya pencarian solusi untuk mengatasi permasalahan kenegaraan” (Wawancara 6 Mei 2019)

Dalam kaderisasi di tingkat DPC tidak terdapat materi yang di khusukan untuk perempuan, materi yang diberikan adalah materi untuk seluruh kader secara umum baik laki-laki maupun perempuan. Tetapi terdapat kaderisasi khusus perempuan yang di laksanakan oleh DPP, Seperti yang di katakana oleh Diah Hari Murti yang juga merupakan Anggota legislatif Kota Semarang

“Pada kaderisasi di tingkat DPC tidak ada materi yang secara khusus membahas tentang perempuan, kebutuhan perempuan dan hal-hal lain yang berkaitan dengan perempuan, materi yang disampaikan dalam kaderisasi ini bersifat sama bagi laki-laki maupun bagi perempuan. Walaupun pada tingkat DPC tidak ada materi kaderisasi yang khusus perempuan, para kader perempuan dapat mengikuti Pendidikan Kader Khusus Perempuan yang di laksanakan oleh DPP PDI Perjuangan yang bisanya dilakukan tiap satu tahun satu kali Pendidikan kader ini terbuka bagi tiap kader perempuan yang artinya setiap kader perempuan berhak ikut berpartisipasi dalam kaderisasi ini.” (Wawancara 31 Desember 2018)

Kaderisasi khusus perempuan yang di laksanakan oleh DPP PDI Perjuangan ini bertujuan agar membentuk jati diri perempuan sebagai jalan peradaban politik yang berwatak kemanusiaan, toleransi, gotong royong dan dedikasi untuk membela rakyat, bangsa dan negara. Materi yang diberikan dalam kaderisasi khusus perempuan ini meliputi ideologi, kepemimpinan, pemahaman Lembaga-lembaga negara, isu-isu social yang berkaitan dengan perempuan, peningkatan pemberdayaan perempuan dan peningkatan kualitas hidup perempuan. PDI Perjuangan benar-benar menyiapkan kader perempuan dengan sebaik-baiknya dengan harapan agar perempuan bisa makin berkontribusi dalam pemerintahan, menjadi kader-kader yang handal, menjadi pemecah masalah bagi setiap permasalahan yang ada khususnya bagi perempuan, dapat mebela masyarakat khususnya perempuan. Peran partai pada tahapan kaderisasi ini sangatlah penting karna, dengan partai melakukan kaderisasi Khusus perempuan akan meningkatkan kualitas dan pemahaman perempuan terkait permasalahan yang dihadapi masyarakat utamanya bagi masyarakat perempuan, dan dengan adanya kaderisasi khusus perempuan ini diharapkan kan mampu mempengaruhi keterpilihan perempuan dalam pemilu yang berjumlah 30%. PDI Perjuangan berkomitmen untuk memberikan ruang yang seluas-luasnya bagi kader perempuan untu berpolitik, PDI Perjuangan juga tidak hanya sekedar memprioritaskan keterpilihan calon legislatif perempuan, tetapi juga memprioritaskan untuk benar-benar mencetak kader-kader yang berkualitas.

### **3.4. Pengurus Perempuan Dalam Kepengurusan DPC PDI Perjuangan Kota Semarang**

Berdasarkan AD/ART Partai dalam kepengurusan di PDI Perjuangan setiap anggota memiliki hak dan kewajiban yang sama. Para anggota berkewajiban menaati setiap peraturan yang ada dan berhak mendapatkan hak-haknya sebagai pengurus partai, partai juga berkewajiban untuk memenuhi hak-hak dari para pengurus partai dan berhak pula memberikan hukuman pada pengurus-pengurus yang tidak menaati aturan. Pengisian jabatan di kepengurusan PDI Perjuangan dilaksanakan secara bertingkat mulai dari tingkatan Pengurus anak ranting hingga tingkat DPC, yang artinya sebelum menjadi pengurus tingkat DPC seorang kader terlebih dahulu harus memiliki jabatan struktural di tingkatan Ranting maupun PAC, Seperti yang diungkapkan Novi Sukmawati Caleg PDI Perjuangan

“Awal karir saya di PDI Perjuangan mulai dari tahun 90an dan dalam kepengurusan saya juga memulai dari bawah yaitu mulai menjadi Ketua Pengurus Ranting baru di tahun 2001 hingga saat ini saya menduduki Wakil Ketua bidang Ekonomi di Kepengurusan DPC, kebetulan pula pada saat itu saya merupakan perempuan satu-satunya yang menjadi ketua PAC se-Kota Semarang. Sebelum menjadi Ketua PAC di tahun 2001 sebelumnya saya sudah mengenal banyak pengurus PDI Perjuangan dan orang-orang penting di PDI Perjuangan serta sudah memahami bagaimana pola gerak dari partai ini, tetapi saya tetap berjuang dari bawah karena saya tidak mau ada anggapan bahwa jika jabatan saya di partai langsung tinggi pada tahun 2001 itu karena faktor ayah saya, saya mau mempertegas bahwa apa yang saya dapatkan merupakan hasil dari kerja keras dan doa restu.” (Wawancara 13 Juni 2019)

Dalam menjalankan aktifitas politik partai memberi proporsi yang sama antara laki-laki dan perempuan. Seperti yang tertulis dalam Anggaran Dasar Pasal 17 ayat 1 yang menyebutkan bahwa setiap anggota partai berhak mendapatkan perlakuan yang



sama berarti, Tidak ada perlakuan khusus yang diberikan pada pengurus perempuan maupun pengurus laki-laki. Kebebasan untuk memilih dan dipilih untuk menempati posisi yang strategis di kepengurusan partai diberikan bagi laki-laki maupun perempuan. Seperti yang dikatakan Lely Purwandari Caleg PDI Perjuangan

“Dalam pengisian jabatan di DPC PDI Perjuangan Kota Semarang kita tidak pernah membedakan antara laki-laki maupun perempuan, tidak ada syarat khusus untuk perempuan maupun syarat khusus untuk laki-laki agar dapat menjadi pengurus PDI Perjuangan baik di tingkat PAC hingga tingkat DPC. Syarat untuk menjadi pengurus itu sederhana yaitu, menguasai materi-materi tentang PDI Perjuangan Seperti garis-garis kebijakan partai, ideologi partai, visi-misi partai dll, Materi yang lain yaitu materi kebangsaan. Yang terpenting juga adalah komitmen pengurus untuk membesarkan partai, mau bekerja untuk masyarakat, menjalankan AD/ART Partai, dan mengamalkan Pancasila. Sekali lagi tidak terdapat syarat khusus bagi perempuan ataupun laki-laki, nanti kalau misalnya ada syarat khusus untuk memudahkan perempuan menjadi pengurus ya nanti laki-lakinya pada teriak, pada ngiri yang nanti malah menyebabkan kegaduhan dan ketidak stabilan partai hal yang sama juga berlaku jika laki-laki diberikan syarat khusus yang memudahkan dia menjadi pengurus” (Wawancara 6 Mei 2019)

Dalam proses pengisian jabatan di PDI Perjuangan dilakukan dengan Konferensi Cabang (Konfercab) yang dilaksanakan setiap 5 tahun sekali dan merupakan tanggung jawab DPC yang dipimpin oleh DPP partai dan/atau DPD partai yang mendapat mandate dari DPP, Konferensi Cabang dinyatakan sah apabila dihadiri oleh Utusan PAC, terdiri dari sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah PAC dan sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah utusan PAC.

Konfercab sendiri di hadiri oleh perwakilan setiap Pengurus Anak Cabang serta peninjau dan undangan yang sudah di tetapkan oleh DPC Partai. Konfercab sendiri membahas tentang Pemilihan Ketua DPC, penggantian kepengurusan, kebijakan dan program kerja partai. Mekanisme dalam konfercab sendiri terlebih dahulu adalah memilih Ketua DPC dan kemudian ketua terpilih tersebut mempunyai hak prerogative untuk menentukan siapa saja yang nantinya akan mejadi pengurus partai, dan kemudian baru menentukan program kerja partai. Dalam konfercab sendiri untuk menentukan Ketua DPC terpilih tidak menggunakan cara voting ataupun suara terbanyak, tetapi menggunakan cara musyawarah untuk mufakat.

Sebelum konfercab untuk memilih Ketua DPC dan jajaran pengurus partai terlebih dahulu dilaksanakan rapat mulai dari tingkan Pengurus Anak Cabang yang dinamakan rapat anak cabang khusus, rapat ini membahas usulan siapa saja orang yang akan dicalonkan sebagai ketua DPC, hasil dari rapat khusus anak cabang itu kemudian baru dibawa konfercab. Seperti yang dikatakan Untung

“Pada waktu pembentukan kepengurusan melewati mekanisme dari tingkat Terendah hingga tertinggi, mulai dari tingkat RW yang dikenal dengan musyawarah anak ranting, kemudian musyawarah tingkat kelurahan yang dikenal dengan musyawarah ranting, Keudian musyawarah tingkat kecamatan yang dikenal dengan musyawarah anak cabang kemudian di tingkat Kota/ DPC dikenal dengan Konfrensi Cabang (Konfercab). Kemudian ditingkat provinsi/DPD dikenal dengan Konfrensi Daerah (Konferda). Terakhir di tingkat nasional/DPP dikenal dengan Kongres Partai.

Pada saat Konfercab terdapat mekanisme penempatan kepengurusan seperti Ketua DPC, yang mekanisme pemilihanya melewati tahapan mulai dari musyawarah anak cabang khusus disini anak cabang menentukan siapa saja wakil yang akan ikut menghadiri konfercab, dan juga disini membahas siapa

saja yang akan dicalonkan untuk menjadi Ketua DPC. Hal yang sama juga berlaku dalam Konferda yang menentukan ketua DPD, dan juga berlaku dalam Kongres yang menentukan posisi Ketua umum/DPP

Di tingkat anak cabang ini dibahas mengenai utusan/wakil yang mengikuti konfercab yang berjumlah tiga orang dalam konfercab, utusan itu membawa program yang hendak disampaikan dalam Konfercab, Utusan itu juga membawa yang membawa mandate dari musyawarah anak cabang khusus tadi untuk mengusulkan calon Ketua Cabang yang disampaikan di forum tersebut. Sejak tahun 2015 PDI Perjuang sudah tidak pernah menggunakan mekanisme voting tapi menggunakan cara musyawarah untuk mufakat. Jika kepengurusan tingkat cabang tidak dapat terbentuk maka diserahkan langsung pada Dewan Pimpinan Pusat (DPP) maka DPP yang akan menentukan siapa Ketua DPC terpilih berdasar konfercab. Tapi jika hasil dari konferjab tidak menemui jalan buntu maka ketua langsung dapat terpilih. Biasanya ketua terpilih sudah dapat di prediksi mulai dari musyawarah anak cabang khusus, di Semarang terdapat 16 Kecamatan yang berarti terdapat 16 pengurus anak cabang

Setelah terpilih Ketua DPC mempunyai hak prerogatif untuk menentukan siapa wakil ketua tiap bidang, siapa sekertaris dan bendahara. Mekanisme pemilihannya dengan cara ketua Bersama tim formatur yang terdiri dari utusan anak cabang hingga tingkat DPP” (Wawancara 28 Desember 2018)

Setelah terpilih Ketua yang baru maka akan di susun struktur kepengurusan partai yang baru, mekanisme penempatan jabatan ini di lakukan dan ditetapkan oleh ketua terpilih, anggota laki-laki dan perempuan memiliki kemungkinan yang sama untuk menempati jabatan di DPC PDI Perjuangan. Seperti yang dikatakan oleh Untung

“Mekanisme penempatan jabatan di DPC PDI Perjuangan Kota Semarang di serahkan seutuhnya kepada Ketua terpilih, ketua memiliki hak prerogative untuk menetapkan siapa saja yang akan dijadikan pengurus. Anggota laki-laki dan perempuan juga memiliki peluang yang sama untuk menjadi pengurus DPC. Ketua DPC memilih anggotanya didasarkan pada kebutuhan DPC dan juga kualitas dari anggota PDI Perjuangan itu sendiri, hanya saja kita juga harus memenuhi perintah Undang\_Undang yang menyatakan bahwa harus ada keterwakilan perempuan minimal 30%, dan walaupun tidak ada praturan tersebut kami tetap akan mengakomodasi perempuan untuk menjadi pengurus

DPC asalkan sesuai dengan kebutuhan dari DPC dan memiliki kualitas yang unggul” (Wawancara 28 Desember 2018)

PDI Perjuangan DPC Kota Semarang sendiri tidak pernah mengalami kesulitan untuk menempatkan perempuan di kepengurusan partai dikarenakan selain anggota perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi pengurus ditambah lagi jumlah anggota perempuan PDI Perjuangan Kota Semarang sangat banyak dan setiap anggota juga ingin menjadi pengurus di DPC PDI Perjuangan Kota Semarang.

Walaupun PDI Perjuangan DPC Kota Semarang memiliki cukup banyak anggota perempuan yang berkualitas tapi sejak kepengurusan DPC PDI Perjuangan Kota Semarang dibentuk belum pernah ada satupun ada perempuan yang terpilih menjadi Ketua DPC, posisi Ketua DPC Kota Semarang selalu diisi oleh laki-laki, hal ini terjadi bukan karena kualitas anggota perempuannya lebih rendah dari kualitas yang dimiliki oleh anggota laki-laki melainkan ini adalah hasil kesepakatan bersama dalam konfercab. Seperti yang dikatakan oleh Untung

“Dari awal DPC PDIP Kota Semarang berdiri tidak ada satupun perempuan yang pernah menjadi Ketua DPC karena memang dalam konfercab itu sendiri setiap PAC mengusulkan nama-nama yang diajukan untuk menjadi calon ketua tak terkecuali perempuan, setiap PAC yang mencalonkan nama-nama tadi kemudian bermusyawarah dan menggodok bareng nama-nama yang akan menjadi Ketua. Inikan keputusan forum banyak orang yang terlibat dalam pengambilan keputusannya dan jika usulan calon ketua itu ditolak adalah suatu hal yang wajar yang terpenting mekanisme pemilihan ketua itu dilaksanakan dengan cara yang sah dan demokratis. Jadi belum adanya Ketua Cabang perempuan itu merupakan keputusan forum dan bukan masalah kualitas. Buktunya di kepengurusan DPC yang lain terdapat ketua dari perempuan seperti di Kebumen pada tahun 2000 dijabat oleh Ibu Rustriningsih, Ketua DPC

Purwodadi dijabat oleh Ibu Sri Sumarni, DPC Kendal Ibu Dr Widiakandi”  
(Wawancara 28 Desember 2018)

Setelah terpilih menjadi pengurus di DPC perempuan akan dihadapkan pada banyaknya agenda-agenda partai yang akan menyita banyak pikiran, waktu dan tenaga. Seperti halnya menjalankan rapat rutin DPC yang tak jarang selesai hingga larut malam otomatis bagi mereka yang sudah berkeluarga dan memiliki anak akan sulit mengatur waktu antara kewajiban sebagai pengurus partai dan kewajiban menjadi ibu rumah tangga. Disini perempuan dituntut untuk dapat membagi waktu antara pekerjaan di partai dan pekerjaan di rumah sehingga kedua pekerjaan tadi sama-sama dapat diselesaikan secara maksimal. Seperti yang dirasakan oleh Diah caleg PDI Perjuangan

“Ketika terpilih menjadi pengurus di tingkat PAC, sudah terbayang di benak saya apa saja tugas-tugas pengurus partai, sebelum menjadi penguruspun harus mengerti kira-kira apa kegiatan atau kewajiban dari anggota, saat itu saya banyak sharing dengan senior saya yang lebih dulu terpilih menjadi pengurus PAC, hal ini penting diketahui perempuan agar memiliki gambaran apa saja kegiatan pengurus, kapan dilaksanakannya, dan bentuk kegiatannya apa. Nah baru setelah benar-benar terpilih maka sebaiknya menyusun jadwal kegiatan harian, kita juga harus pinter-pinter mengatur waktu kalau tidak ya bisa berantakan. Saya sebagai ketua PAC benar-benar dituntut untuk bisa membagi waktu antara pekerjaan saya sebagai anggota dewan yang harus memperjuangkan rakyat, posisi saya yang bisa di bilang penting di Partai dan juga posisi saya sebagai ibu rumah tangga. Saya bersyukur hamper 20 tahun saya menekuni dunia politik semua kewajiban saya baik sebagai pengurus partai, sebagai ibu dan sebagai wakil rakyat saya tidak pernah menemukan kendala berarti dalam pembagian waktu.” (Wawancara 31 Desember 2018)

### **3.5 Rekrutmen Calon Legislatif Perempuan**

Rekrutmen adalah proses seleksi dan pengangkatan seseorang agar dapat menjalankan sejumlah peranan pada proses-proses politik pada umumnya dan pemerintah pada khususnya. Rekrutment calon legislatif perempuan benar-benar dibutuhkan karena dengan cara perekrutan calon legislatif perempuan yang berdasarkan pada Undang-undang maka akan memberikan peluang yang besar bagi perempuan untuk menyalurkan aspirasinya dan kepentingannya sebagai warga negara dalam dunia politik. Seperti yang di ungkapkan Novi Sukmawati Caleg PDI Perjuangan

“Rekrutmen calon legislatif perempuan di DPC PDI Perjuangan Kota Semarang dilakukan dengan mempertimbangkan posisi kader dalam kepengurusan structural partai, partai memberi kesempatan yang sebesar-besarnya untuk perempuan mendaftarkan diri sebagai calon legislatif dengan memenuhi persyaratan seperti kelamaan kenggotaan, jabatan structural, keaktifan terjun ke masyarakat dan aktifitas di bidang apa saja. PDI Perjuangan sudahlah bijaksana dalam menempatkan perempuan pada saat pencalonan legislatif karna peraturan kami di AD/ART kami mengatur pula keterwakilan perempuan minimal 30% jadi hal ini hukumnya wajib untuk dilaksanakan” (Wawancara 13Juni 2019)

Fungsi rekrutmen politik sangatlah penting tidak hanya pada segi legitimasi kewenangan, tetapi juga menjamin kualitas kepemimpinan bangsa di segala lembaga negara baik di tingkat pusat maupun di tingkat didaerah. Agar orang-orang yang direkrut ke dalam berbagai posisi kenegaraan itu memiliki kualitas kepemimpinan

diperlukan untuk melaksanakan itu partai politik melakukan kaderisasi kepemimpinan baik dalam visi dan misi perjuangan.

Fungsi partai politik adalah sarana untuk rekrutmen politik masyarakat seperti pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang menjelaskan rekrutmen terhadap bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan ketua Untung

“Kita disini PDI Perjuangan Kota Semarang memiliki kewajiban dan kewenangan untuk menghimpun kader-kader terbaik partai yang memiliki dedikasi tinggi terhadap partai, masyarakat, bangsa dan negara untuk membela kepentingan rakyat dengan cara dicalonkan sebagai calon anggota legislatif. PDI Perjuangan membuka pintu seluas-luasnya bagi anggota partai yang ingin mencalonkan diri sebagai calon legislatif asalkan anggota tersebut memenuhi kriteria-kriteria yang ditentukan partai dan sesuai dengan peraturan partai yang ditetapkan oleh DPP partai dalam hal ini peraturan partai Nomor 25A tahun 2018 tentang rekrutmen dan seleksi calon anggota legislatif 2018” (Wawancara 31 Desember 2018)

Dalam pemilihan umum legislatif tahun 2014-2019 Kota Semarang, DPC PDI Perjuangan Semarang mengajukan 50 nama calon legislatif yang diantaranya terdapat calon legislatif perempuan sesuai yang diamanatkan pada Undang-undang No 10 tahun 2008 tentang Pemilu Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dalam pemilu legislatif tersebut DPC PDI Perjuangan kota Semarang mengajukan 50 calon legislatif dengan rincian 30 orang calon legislatif laki-laki dengan presentase sebesar 60% dan calon legislatif perempuan yang berjumlah 20 orang dengan presentase sebesar 40%, Jumlah ini sudah memenuhi

dari syarat yang ditetapkan oleh KPU. Dalam Pemilu legislatif 2014 Kota Semarang berhasil mendapatkan 15 kursi di DPRD kota Semarang, dari lima belas anggota yang terpilih terdapat orang perempuan dengan presentase 33% perempuan dan 67% laki-laki.

Dalam pemilu legislatif tahun 2019 PDIP Perjuangan mengajukan calon legislatif sebanyak 50 orang dengan rician 31 orang calon legislatif laki-laki dengan presentase sebanyak 61% dan 19 calon legislatif perempuan dengan presentase sebanyak 38% yang mana jumlah ini sudah memenuhi dari persyaratan yang ditetapkan Undang-Undang No 2 Tahun 2008. Dalam pelaksanaan pemilu legislatif tingkat Kabupaten/Kota Kota Semarang sendiri dibagi menjadi enam dapil yaitu Daerah Pemilihan I meliputi Semarang Barat dan Semarang Selatan, Daerah Pemilihan II meliputi Semarang Timur, Semarang Utara dan Semarang tengah, Daerah Pemilihan III yaitu Gayamsari, Pedurungan dan Genuk, Daerah Pemilihan IV Tembalang dan Candisari, Daerah Pemilihan V yaitu Gunungpati, Banyumanik dan Gajahmungkur serta yang terakhir Daerah Pemilihan VI yaitu Mijen, tugu dan Ngaliyan.

Agar dapat menjadi seorang calon anggota legislatif harus memperhatikan dan memenuhi persyaratan yang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 10 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Seorang calon legislatif perempuan yang mencalonkan diri untuk menjadi anggota legislatif juga harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh partai sebagaimana diatur dalam Peraturan



Partai No 15A Tahun 2018 tentang, Rekrutmen dan Seleksi Calon Anggota DPD, DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Seperti yang dikatakan oleh Untung

“Terdapat beberapa persyaratan bagi anggota baik perempuan maupun laki-laki untuk dapat dicalonkan mejadi calon anggota legislatif dari PDI Perjuangan persyaratanya sendiri bersifat umum baik itu untuk laki-laki maupun perempuan, persyaratanya sendiri yang membuat adalah DPP disini DPC tinggal menjalankan saja apa ketetapan yang di tetapkan oleh DPP jika dalam hal pencalonan di 2019 maka harus berpegang teguh pada Peraturan Partai no 25 tahun 2018. Disini diatur secara detail tentang syarat-syarat menjadi calon legislatif dari PDI Perjuangan seperti megisi surat pernyataan tidak terlibat kongres di Medan dan kongres di Palu, tidak akan menolak setiap keputusan partai, bersedia di tugaskan di mana saja sesuai dengan kebutuhan dan pertimbangan partai dan terdapat beberapa persyaratan yang lainnya”(Wawancara 28 Desember 2018)

Pelaksanaan rekrutmen calon anggota legislatif DPR DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota di PDI Perjuangan berdasarkan Peraturan Partai Nomor 25A Tahun 2018 tentang Rekrutmen dan Seleksi Calon Anggota DPD, DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Rekrutmen yang dijalankan oleh PDI Perjuangan melalui tiga tahapan mulai dari penjaringan, penyaringan dan penetapan, ketiga tahapan dapat dijelaskan sebagai berikut

### **5.1 Penjaringan**

Tahapan penyaringan adalah tahapan pertama yang dilalui seorang anggota agar dapat menjadi calon anggota legislatif baik itu DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Penyaringan bakal calon anggota ini dilakukan oleh seluruh struktur partai mulai dari DPP Partai, DPD Partai, dan DPC Partai. Pada dasarnya setiap

anggota memiliki kesempatan yang sama untuk dijadikan sebagai calon anggota legislatif asalkan sudah memenuhi persyaratan yang ditentukan partai dan undang-undang

Tabel 3.1

Persyaratan Penjaringan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Oleh DPP

No	Persyaratan
1	Mengisi surat pernyataan tidak terlibat Kongres PDI di Medan/Kongres Medan atau Kongres PDI di Palu/Kongres Palu&mengisi Surat Pernyataan tidak melakukan penolakan terhadap hasil-hasil Kongres Partai (Form CLG-2),
2	mengisi formulir daftar riwayat hidup dan pengalaman membela rakyat (Form CLG-3)
3	mengisi formulir rekrutmen calon anggota DPR RI DPD, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota yang disediakan oleh DPP Partai (Form CLG-4),
4	Telah mengikuti kaderisasi yang dilaksanakan oleh Partai yang dibuktikan dengan sertifikat atau surat keterangan telah mengikuti pendidikan kader Partai yang dilakukan oleh Dewan Pimpinan Partai sesuai tingkatannya
5	Mengisi surat pernyataan kesediaan mengikuti tes-tes yang dilaksanakan oleh Partai (Form CLG 5)
6	mengisi surat pernyataan kesediaan melaksanakan penugasan-penugasan yang diberikan Partai, termasuk kesediaan ditempatkan di seluruh daerah pemilihan (Form CLG-6)
7	mengisi surat pernyataan kesediaan menyerahkan dana gotong-royong untuk kampanye partai( Form CLG-7)
8	Mengisi form isian bobot skoring (Form CLG-8)
9	surat keterangan bebas narkoba dan psikotropika
10	melaporkan harta kekayaan kepada DPP Partai
11	Surat pernyataan mengundurkan diri sebagai calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD Kabupaten/kota (Form CLG-9)
12	Surat pernyataan mencalonkan diri sebagai calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten /kota; dan(Form CLG-10)
13	Surat pernyataan dukungan pemenangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesiadari PDI Perjuangan pada Pemilu 2019 (Form CLG-11),

14	Dokumen-dokumen lain yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD;
15	mengisi formulir persyaratan administratif lainnya yang disediakan oleh DPP Partai (Form CLG-12)

Sumber: Pasal 21 PP No 25A

Sedangkan persyaratan bagi setiap bakal calon anggota DPR RI, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota diatur dalam UU No 10 Tahun 2008 pasal 50, yaitu sebagai berikut.

Tabel 3.2

Persyaratan Pendaftaran Bakal Calon Legislatif Berdasar Undang-Undang

No	Persyaratan
1	Merupakan Warga Negara Indonesia yang minimal berumur 21 tahun atau lebih.
2	bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
3	bertempat tinggal di wilayah NKRI.
4	Fasih dalam berbicara, membaca, dan menulis dengan menggunakan bahasa Indonesia.
5	Telah menempuh pendidikan serendah-rendahnya tamat Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lainnya yang sederajat.
6	setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, UUD 1945, dan cita-cita proklamasi 1945.
7	belum pernah dijatuhi pidana kurungan penjara dengan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana 5 (lima) tahun kurungan atau lebih.
8	Sehat secara jasmani dan rohani.
9	Telah terdaftar sebagai pemilih.
10	bersedia bekerja penuh waktu.
11	Telah mengundurkan diri sebagai pegawai negeri sipil, anggota TNI, anggota kepolisian Negara Republik Indonesia, pengurus pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali.
12	bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat/pengacara, notaris, pejabat pembuat akta tanah (PPAT), dan tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan peraturan perundang undangan.

13	bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, pengurus pada badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah, serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara.
14	menjadi anggota partai politik peserta pemilu
15	dicalonkan hanya di 1 (satu) lembaga perwakilan
16	dicalonkan hanya di 1 (satu) daerah pemilihan.

Sumber UU No 10 Tahun 2008

Setelah para bakal calon memenuhi berbagai persyaratan yang diberikan oleh partai maupun Undang-Undang maka para bakal calon harus sudah mengembalikan dokumen administrasi/ form pendaftaran paling lambat lima hari sebelum pendaftaran ditutup. Setelah pendaftaran ditutup maka DPC Partai melaksanakan dan mengumumkan hasil dari verifikasi dan validasi kelengkapan dokumen administrasi paling lambat lima hari setelah batas akhir penyerahan dokumen oleh para bakal calon legislatif.. Bakal calon yang Berdasarkan hasil verifikasi dan validasi dinyatakan tidak lengkap atau terdapat beberapa hal yang harus di perbaiki, maka partai memberikan waktu paling lama tiga hari untuk melengkapi dan memperbaiki dokumen. Apa bila bakal calon yang tidak lolos validasi dan verifikasi tadi tidak mengembalikan dan melengkapi berkas ataupun tidak melakukan perbaikan atas kekurangan dari persyaratan tersebut maka dinyatakan tidak lolos dan tidak memenuhi syarat sebagai calon anggota legislatif. Sedangkan bakal calon yang berdasarkan hasil verifikasi dan validasi dokumen administrasi dinyatakan lengkap dan memenuhi syarat termasuk calon yang ditugaskan oleh DPP Partai maupun DPD Partai akan disusun dalam nomor urut pada rapat pleno DPC Partai. Hasil dari penjaringan calon anggota DPRD yang dilakukan oleh DPC Partai diserahkan pada DPP Partai melalui DPD Partai disertai

dengan berita acara rapat pleno DPC Partai, dokumen administrasi seluruh calon.

Seperti yang dikatakan Untung.

“Untuk tahapan penjaringan bakal calon anggota legis latif baik perempuan maupun laki-laki kami tidak pernah membeda-bedakan da memberikan perlakuan khusus pada calon anggota. PDI Perjuangan sendiri pada tahap ini lebih memfokuskan pada terpenuhinya beberpa persyaratan yang telah di tetapkan oleh partai dan Undang-undang yaitu persyaratan administrasi. Karna sebenarnya pada tahapan pemenuhan syarat administrasi ini yang agak ribet karena syaratnya juga banyak dan jika satu syaratpun tidak terpenuhi maka berkas tersebut dikembalikan lagi kepada bakal calon anggota legislatif untuk kemudian di lengkapi kekurangannya, jika baal calon anggota legislatif tersebut tidak melengkapi persyaratan administrasi yang kurang tadi maka bakal calon legislatif tersebut dinyatakan gugur atau batal mendafat. Di DPC sendiri untuk pelengkapan syarat administrasi di bebankan pada bakal calon anggota dan tim suksesnya jika di DPC paling hanya mengkoordinir pada tahapan tes narkoba. DPC PDI Perjuangan juga tidak pernah memberikan bantuan khusus untuk melengkapi syarat administrasi anggotanya baik anggota laki-laki maupun anggota perempuan” (Wawancara 28 Desember 2018)

## **5.2. Penyaringan**

Penyaringan adalah bagian dari proses seleksi nama-nama calon anggota DPRD kabupaten/kota, DPRD provinsi, dan/atau DPR RI sampai dengan penetapan nomor urut calon anggota. DPC partai wajib menyelenggarakan Rakercabsus partai untuk:

- a. menentukan sedikitnya 1 (satu) calon anggota DPR RI;
- b. menentukan calon anggota DPRD provinsi, sedikitnya 1 (satu) kali kuota (jumlah kursi) anggota DPRD provinsi pada masingmasing kabupaten/kota disampaikan kepada DPD partai untuk dibawa kedalam Rakerdasus partai;
- c. menentukan calon anggota DPRD kabupaten/kota sebanyak banyaknya 2 (dua) kali kuota (jumlah kursi) pada masing-masing kabupaten kota;
- d. membentuk tim verifikasi sesuai dengan daerah pemilihan masing-masing; dan

- e. tim verifikasi sebagaimana dimaksud di atas beranggotakan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang, terdiri dari unsur DPC dan unsur PAC dengan perimbangan 3 (tiga) berbanding 2 (dua).

Kriteria anggota tim verifikasi sesuai PP No 25A Tahun 2008 adalah sebagai berikut.

- a. menjadi pengurus harian partai dengan penetapan sesuai dengan peraturan partai;
- b. menjadi anggota partai sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun terus menerus;
- c. tidak sedang mendapatkan sanksi karena pelanggaran disiplin partai partai sebagaimana dimaksudkan di dalam AD-ART partai
- d. tidak sedang menjalani penyidikan oleh aparat penegak hukum karena penyalahgunaan keuangan partai, tersangkut kasus narkoba dan psikotropika dan/ atau pelanggaran hukum karena tindak pidana kejahatan;
- e. tidak rangkap jabatan sebagai pengurus struktural dengan anggota DPRD provinsi dan atau DPRD kabupaten/kota.
- f. mendapat mandat dari struktural partai ditingkatnya untuk menjadi anggota tim verifikasi; dan
- g. tim verifikasi bertanggung jawab kepada rapat kepada rapat kerja khusus sesuai tingkatannya.

Tahap penyaringan sebagaimana dijelaskan Untung dalam wawancara dengan peneliti adalah sebagai berikut.

“Penyaringan dimulai dengan pengisian formulir rekrutmen Caleg oleh anggota partai yang direkrut disertai dengan data pendukung bukti diri, sesuai dengan format dokumen yang ditetapkan oleh PDI Perjuangan. DPC membawa seluruh nama bakal Caleg yang terjaring di Musancabsus dan yang dijaring oleh DPC partai ke Rakercabsus. Sebelum dilakukan verifikasi, nama-nama yang terjaring diumumkan dalam forum Rakercabsus/Rakerdasus. Kemudian dilakukan verifikasi terhadap kebenaran pengisian formulir rekrutmen dan kebenaran data pendukung bukti diri calon legislatif” (Wawancara 28 Desember 2018)

### **5.3. Penetapan dan pengesahan**

Penetapan nomor urut adalah menetapkan nomor urut calon yang akan diajukan oleh partai yang diputuskan melalui rapat struktur partai pada tingkatannya. Tahap penetapan dilakukan setelah tim verifikasi melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan administrasi persyaratan, kebenaran pengisian formulir rekrutmen serta kebenaran data pendukung bukti diri Caleg pada tahap penyaringan. Penetapan nomor urut dilakukan berdasarkan ketentuan dalam Surat Peraturan Partai No 25 tahun 2018 tentang Tata Cara Penjaringan, Penyaringan dan Penetapan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota, DPRD Provinsi dan DPR-RI PDI Perjuangan Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagai berikut. 1

- a. jabatan calon di struktur partai;
- b. nilai bobot calon;
- c. penugasan calon oleh struktur partai;
- d. hasil persentase perolehan suara PDIP pada pemilu 2004;
- e. jumlah pemilih dari daerah yang diwakilinya.

Penetapan nomor urut didasarkan pada jabatan calon di struktur partai memiliki ketentuan sebagai berikut.

- a. Ketua umum dan sekretaris jendral partai memiliki prioritas untuk ditetapkan menjadi calon dengan nomor urut utama DPR RI;
- b. Ketua dan sekretaris DPD partai memiliki prioritas untuk ditetapkan menjadi calon dengan nomor urut utama DPRD provinsi;
- c. Ketua, sekretaris DPC, dan ketua PAC partai memiliki prioritas untuk ditetapkan menjadi calon dengan nomor urut utama DPRD kabupaten/kota.

Bakal calon yang memiliki bobot nilai yang lebih tinggi, berhak ditempatkan pada nomor urut dibawah yang disebutkan diatas. Nilai bobot dihitung berdasarkan

data pendukung calon. Bila dalam suatu daerah pemilihan dijumpai adanya calon yang mempunyai nilai bobot sama, maka prioritas nomor urut diberikan kepada calon yang berasal dari daerah yang memperoleh suara yang lebih besar dalam pemilu 2004, jumlah pemilih yang lebih banyak atau adanya penugasan calon oleh struktur partai.

Ketentuan mengenai waktu pelaksanaan dan pelanggaran rekrutmen calon legislatif dalam pemilu tahun 2019, berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Untung sebagai berikut.

“Jadwal pelaksanaan dan target waktu penyelesaian penjaringan dan penyaringan calon legislatif bersifat mengikat, dan harus menjadi acuan dalam proses pelaksanaan penjaringan dan penyaringan oleh struktur partai pada semua tingkatan yang ditetapkan oleh DPP PDI Perjuangan melalui PP. Pelanggaran-pelanggaran atas ketentuan di dalam seluruh proses, baik tahap penjaringan, penyaringan, dan penetapan nomor urut dikategorikan sebagai pelanggaran disiplin organisasi partai dan dikenakan sanksi organisasi sesuai dengan AD-ART partai serta peraturan disiplin organisasi partai agar tercipta ketertiban bukan kecurangan-kecurangan pada intern partai” (Wawancara 28 Desember 2018)

Dalam rekrutmen legislatif PDI Perjuangan tidak pernah membedakan antara bakal calon legislatif perempuan dengan bakal calon legislatif laki-laki, PDI Perjuangan memberikan kesempatan yang sama bagi kadernya baik itu laki-laki maupun perempuan asalkan sudah memenuhi apa persyaratan baik persyaratan yang ditetapkan oleh PDI Perjuangan maupun persyaratan yang ditetapkan oleh undang-undang. Dalam penetapan calon legislatif perempuan PDI Perjuangan sudah memenuhi undang-undang no 7 tahun 2017 yang mengharuskan bahwa daftar bakal calon anggota legislatif yang diajukan partai politik, memuat 30% keterwakilan perempuan ditambah dengan aturan setiap tiga nama calon legislatif setidaknya terdapat satu orang calon legislatif perempuan.



## **6. Faktor-Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Rekrutmen Perempuan Sebagai Calon Legislatif 2019**

### **6.1. Faktor Pendorong Rekrutmen Calon legislatif Perempuan PDI Perjuangan Kota Semarang**

Kemenangan suatu partai tidak dapat dipisahkan dari kerjasama yang apik dari setiap bagian dalam partai politik di tiap kepengurusan baik dari tingkat pusat sampai tingkat daerah. Faktor pendukung PDI Perjuangan Kota Semarang dapat melaksanakan fungsinya dalam merekrut anggota, pengurus DPC, calon legislatif perempuan dalam pemilihan legislatif 2019 antara lain didukung adanya kepengurusan yang solid dalam tubuh partai. Struktur organisasi yang kuat dari pengurus tingkat DPC hingga pengurus tingkat Pengurus Ranting dan Anak Ranting (tingkat RW) menjadikan kader perempuan lebih mudah dalam terlibat langsung dan berinteraksi dengan masyarakat. Kader Perempuan PDI Perjuangan di tingkat ranting dan anak ranting akan lebih memahami keinginan dan kebutuhan masyarakat karena lingkup tidak terlalu luas. DPC PDI Perjuangan dapat berkoordinasi dengan PAC, pengurus ranting dan anak ranting tentang perkembangan PDI Perjuangan di masing-masing wilayah.

Kota Semarang menjadi basis dari PDI Perjuangan yang berideologi nasionalis sesuai dengan kondisi sebagian besar masyarakat Kota Semarang yang berbasis nasionalis pula, menjadikan partai lebih mudah dalam menyampaikan ideologi, visi dan misi partai ke masyarakat. Visi dan misi partai serta program kerja partai akan

lebih mudah diterima masyarakat karena sesuai dengan keinginan masyarakat Kota Semarang yang sebagian besar berbasis nasionalis.

Kemenangan-kemenangan PDI Perjuangan pada Pemilu di Kota Semarang menjadi salah satu factor pendukung partai dalam rekrutmen politik perempuan, dengan besarnya basis masa PDI Perjuangan maka para calon legislatif perempuan yang berkeinginan untuk menjadi anggota legislatif bergabung dengan PDI Perjuangan. Walaupun banyak sekali caleg perempuan yang motivasi utamanya hanya menggunakan PDI Perjuangan sebagai kendaraan politik dalam memperoleh kekuasaan saja.

Calon legislatif perempuan yang menjadi anggota PDI Perjuangan juga terdorong oleh kekagumannya terhadap figur Bung Karno dan putrinya Megawati Soekarno Putri. Soekarno yang nasionalis dan begitu berkarakter begitu banyak memberikan pengaruh terhadap banyaknya masyarakat yang bergabung ke PDI Perjuangan, sedangkan Megawati banyak di idolakan oleh masyarakat tertutamanya kaum perempuan karna bukan hanya dirinya sebagai Ketua Umum Partai dan merupakan Presiden perempuan pertama di Indonesia, tapi Megawati dinilai dapat merepresentasikan perempuan Indonesia yang kuat dan teguh dalam memperjuangkan kepentingan bangsa makanya tak heran jika banyak alasan perempuan masuk ke PDI Perjuangan lantaran ketokohan Megawati ini

kedua figur ini menjadi bagian yang tidak terlepas dari eksistensi PDI Perjuangan. Bukan tidak mungkin tokoh tokoh lain dari PDI Perjuangan yang dikagumi

oleh masyarakat sehingga mereka tertarik masuk keanggotaan PDI Perjuangan. Keaktifan kader PDI Perjuangan juga berpengaruh terhadap rekrutmen anggota baru PDI Perjuangan, kalau kader aktif maka anggota yang direkrut juga semakin meningkat. Selain keaktifan kader PDI Perjuangan, perilaku baik kader PDI Perjuangan di masyarakat juga mendukung antusias masyarakat masuk menjadi anggota PDI Perjuangan.

## **6.2. Faktor Penghambat Rekrutmen Calon legislatif Perempuan PDI Perjuangan**

### **Kota Semarang**

Proses pelaksanaan rekrutmen calon legislatif perempuan yang dilakukan oleh PDI Perjuangan Kota Semarang tidak sepenuhnya berjalan dengan apa yang di harapkan oleh partai dan masyarakat, kondisi tersebut dikarenakan terdapat beberapa hambatan-hambatan yang membuat hasil rekrutmen calon legislatif perempuan tidak berjalan efektif. Beberapa hambatan itu diantaranya

- a. Kehadiran suatu partai politik tidak mampu memberikan nilai tawar yang lebih terhadap suara caleg perempuannya. Keberadaan parpol hanyalah sarana untuk mencalonkan diri sebagai sebagai calon legislatif. Partai PDI Perjuangan juga tidak memberi pendampingan khusus bagi perempuan dan juga tidak memberikan bantuan khusus bagi calon legislatif perempuan baik berupa

bantuan materi maupun bantuan alat peraga kampanye, membuat calon legislatif kesulitan untuk mendapatkan banyak suara.

- b.** PDI Perjuangan tidak mempunyai strategi khusus yang berfungsi untuk meningkatkan keterpilihan perempuan di DPRD Kota Semarang. Kehadiran calon legislatif perempuan terkesan untuk pemenuhan persyaratan agar PDI Perjuangan dapat menjadi peserta pemilu. Pengurus partai tidak pernah menyiapkan strategi khusus yang berfungsi untuk meningkatkan perolehan suara caleg perempuan.